

## Pelatihan Pembuatan Program POP Bimbingan dan Konseling bagi Guru MI NU Banat Kudus

Richma Hidayati<sup>i</sup>, Sucipto<sup>ii</sup>

<sup>i</sup> Program Studi Bimbingan Konseling, FKIP, Universitas Muria Kudus

<sup>ii</sup> Program Studi Bimbingan Konseling, FKIP, Universitas Muria Kudus

email : [richma.hidayati@umk.ac.id](mailto:richma.hidayati@umk.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

*Diterima:* 25 Juni 2020

*Direvisi:* 21 Januari 2021

*Disetujui:* 20 Pebruari 2021

*Dipublikasikan:* 30 Maret 2021

#### Keyword:


Program POP, Bimbingan dan Konseling

### Abstract

Tidak seperti di SMP dan SMA sederajat yang kinerja guru BK di sekolah telah tersusun sangat rapi dan sistematis, terdapat panduan khusus yang masuk dalam kurikulum dengan jam masuk kelas yang jelas, serta didukung dengan adanya Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) tingkat SMP dan SMA yang memudahkan pelaksanaan layanan di SMP dan SMA bisa berjalan dengan efisien. BK di MI maupun di SD belum terbentuk jelas di Kurikulum, pelaksanaan BK di MI Nu Banat Kudus belum berjalan dengan optimal. Bahkan banyak guru mapel yang beranggapan bahwa guru BK hanya menangani anak-anak yang bermasalah saja tanpa ada perencanaan program yang matang di setiap tahun dan setiap jenjang kelasnya. Guru BK di sana, belum pernah membuat program BK khusus yang digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan Layanan BK. Program POP BK yang menjadi dasar dalam pembuatan program Bk sesuai dengan Kurikulum K13 mulai dari program tahunan, program semester, dan program bulanan belum pernah dibuat, sehingga menyulitkan para guru ketika akan memberikan layanan yang tepat. Antara guru Mapel dan guru Bk juga sering terjadi selisih paham karena belum adanya sinkronisasi layanan BK dengan Mapel di dalam kelas. Oleh karena permasalahan tersebut, maka program pengabdian kepada masyarakat ini akan melakukan pelatihan bagi guru BK dan Guru Mapel dalam pembuatan program POP BK di sekolah yang bisa membantu perkembangan peserta didik secara optimal dan bisa terintegrasi dengan mata pelajaran dan tema dalam kurikulum K13.

[Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY](#)



 <https://doi.org/10.24176/mjlm.v3i1.4907>

### Pendahuluan

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial, sedangkan konseling sendiri merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru pembimbing atau konselor dengan siswanya (Jamal Ma'mur Asmani, 2010). Sebenarnya "Bimbingan dan konseling" adalah istilah yang saling berhubungan. Dua kata tersebut selalu dirangkai bagaikan kata majemuk.

Pada intinya, guru bimbingan konseling (BK) adalah guru yang memberikan bantuan kepada siswa agar siswa mampu menghadapi masalah atau problem yang sedang dihadapinya, dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada dari dalam dirinya.

Sebenarnya pelayanan bimbingan dan konseling perlu diselenggarakan di sekolah dasar (SD) agar pribadi dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal. Tapi faktanya banyak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang tidak mempunyai guru bimbingan konseling (BK). Biasanya guru kelas lah yang berperan memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Melihat realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang penuh dengan beban, seperti mengajar dan mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan konseling kurang membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar.

Pendidikan di tingkat sekolah dasar merupakan momen paling penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Pada saat itulah anak berkembang dengan aktif-aktifnya. Mereka mudah menangkap hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Pada momen-momen inilah orang tua jangan sampai menyia-nyiakan momen tersebut. Maka dari itu, dilingkungan keluarga peran orang tua sangat di perlukan.

Dilingkungan sekolah peran guru juga tidak kalah pentingnya. Disinilah peran BK sangat diperlukan. Menjadi seorang guru SD tidak sebatas hanya butuh kesabaran, ketelatenan dan penguasaan terhadap materi. Tetapi juga harus memahami kondisi anak didiknya. Sehingga dapat mengarahkan anak didiknya dengan baik.

Apabila timbul rasa kenyamanan terhadap seorang guru, maka anak akan merasa senang terhadap gurunya. Kondisi nyaman dan senang ini akan menumbuhkan kepercayaan seorang anak terhadap gurunya. Disinilah seorang guru mempunyai kesempatan untuk menanamkan karakter kepada seorang anak. Karena pada kondisi tersebut anak akan selalu patuh terhadap apa yang di nasihatkan oleh gurunya.

Jika ditinjau secara mendalam, setidaknya ada tiga hal utama yang melatarbelangi perlunya bimbingan yakni tinjauan secara umum, sosio kultural dan aspek psikologis. Secara umum, latar belakang perlunya bimbingan berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sudah barang tentu perlu mengintegrasikan seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, salah satunya komponen bimbingan. Bila dicermati dari sudut sosio kultural, yang melatar belakangi perlunya proses bimbingan adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sehingga berdampak disetiap dimensi kehidupan. Hal tersebut semakin diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara laju lapangan pekerjaan relatif menetap.

Pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah dasar terintegrasi dengan semua mata pelajaran.

Dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya, Guru BK di SD terutama di MI NU Banat Kudus tidak hanya menangani anak yang bermasalah saja, namun perlu perencanaan khusus, sehingga proses pelaksanaan layanan Bk di sekolah tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Tidak seperti di SMP dan SMA sederajat yang kinerja guru BK di sekolah telah tersusun sangat rapi dan sistematis, terdapat panduan khusus yang masuk dalam kurikulum dengan jam masuk kelas yang jelas, serta didukung dengan adanya Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) tingkat SMP dan SMA yang memudahkan pelaksanaan layanan di SMP dan SMA bisa berjalan dengan efisien. BK di MI maupun di SD belum terbentuk jelas di Kurikulum, pelaksanaan BK di MI Nu banat Kudus belum berjalan dengan optimal. Bahkan banyak guru mapel yang beranggapan bahwa guru BK hanya menangani anak-anak yang bermasalah saja tanpa ada perencanaan program yang matang di setiap tahun dan setiap jenjang kelasnya.

Guru BK di sana, belum pernah membuat program BK khusus yang digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan Layanan BK. Program POP BK yang menjadi dasar dalam pembuatan program Bk sesuai dengan Kurikulum K13 mulai dari program tahunan, program semester, dan program bulanan belum pernah dibuat, sehingga menyulitkan para guru ketika akan memberikan layanan yang tepat. Antara guru Mapel dan guru Bk juga sering terjadi selisih paham karena belum adanya sinkronisasi layanan BK dengan Mapel di dalam kelas.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka program pengabdian kepada masyarakat ini akan melakukan pelatihan bagi guru BK dan Guru Mapel dalam pembuatan program POP BK di sekolah yang bisa membantu perkembangan peserta didik secara optimal dan bisa terintegrasi dengan mata pelajaran dan tema dalam kurikulum K13.

### Hasil dan Pembahasan

Memahami dasar atau landasan layanan BK memungkinkan guru BK atau stakeholder yang nantinya mendukung program BK untuk mengembangkan dan melaksanakan layanan BK yang tepat dan maksimal.

Santoadi (2010) berpendapat bahwa layanan BK didasari pemahaman bahwa layanan tersebut berorientasi para perkembangan personal atau individu setiap siswa. Selain itu program atau layanan BK dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuous*) dan berurutan (*sequential*). Sehingga komponen-komponen layanan yang ada mendukung perkembangan siswa yang efektif dan bermakna. Prinsip lain yang mendasari layanan BK adalah pemerataan layanan. Setiap siswa mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan, baik dalam layanan yang bertujuan *curative* (pemulihan), *preventive* (pencegahan), *developmental* (pengembangan), maupun *perseverative* (kelanjutan atau tindak lanjut dari yang sudah atau pernah ada).

Sementara itu, Winkel dan Hastuti (2005) mendaftarkan beberapa asas yang mendasari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, antara lain bahwa layanan BK

1. memberi perhatian kepada perkembangan peserta didik,
2. bersifat subyektif kepada dunia peserta didik, dalam pengertian layanan BK menolong peserta didik memahami diri sendiri dan memaknai lingkungan sekitarnya, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan perubahan dalam layanan yang diberikan;
3. berangkat dari kerja sama antara pendidik sebagai konselor dan peserta didik sebagai konseli, dengan kesepakatan tanpa ada keterpaksaan;
4. mengakui martabat dan keutuhan penerima layanan sebagai manusia yang 'berdaulat dan bekehendak bebas', dan menghargai hak-hak asasi peserta didik sebagai manusia yang memiliki kebebasan membuat dan mengambil pilihan yang berbeda-beda;
5. 'bercorak ilmiah dan merupakan ilmu terapan' yang berarti layanannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun tetap membutuhkan 'kebijaksanaan dan kesenian hidup';
6. diberikan dan tersedia bagi semua peserta didik, tanpa membeda-bedakan; dan
7. merupakan sebuah proses, berkelanjutan dan berkesinambungan, tertata dan mengikuti tahap perkembangan usia peserta didik.

Beberapa prinsip atau asas tersebut mendasari pengembangan dan perencanaan layanan BK. Jika kemudian layanan BK di sekolah dipandang sebagai sebuah program, maka diperlukan adanya pengelolaan atau manajemen program yang tepat. Serupa dengan prinsip layanan BK, Santoadi (2010) mencatat beberapa prinsip manajemen program BK agar layanan BK nantinya efektif, efisien, dan berdampak maksimal, yaitu:

1. program BK disusun dan direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik,
2. program BK bersifat realistis, spesifik dan operasional;
3. program BK perlu melaksanakan penempatan petugas/pelayan (*staffing*) yang tepat,
4. program BK disusun dan diorganisasikan dengan sederhana,
5. program BK memerlukan kerja sama antar komponen sekolah untuk mewujudkan layanan BK yang maksimal, dan
6. program BK merupakan bagian yang integral, tidak terpisah, dari program program sekolah yang lainnya.

Dari prinsip-prinsip pengelolaan program BK tersebut, kemudian perlu dilaksanakan beberapa tahap atau melibatkan beberapa komponen penyusunan program agar layanan BK yang nantinya diberikan dapat efektif dan efisien. Santoadi (2010) mendaftarkan enam komponen pengelolaan program BK, yaitu (1) perencanaan/*planning*, (2) pengorganisasian/*organizing*, (3) penempatan petugas/ *staffing*, (4) pengarahan/*directing*, (5) koordinasi/*coordinating*, dan (6) penyusunan anggaran/*budgeting*. Makalah ini berfokus pada komponen perencanaan/*planning*, dan *designing*/perencanaan, sebagai bagian dari perencanaan program.

### A. Perencanaan (Planning) Program BK

Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling (POP BK) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan (2016) baik untuk tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK membahas tiga hal penting dalam proses perencanaan program BK di sekolah. Asesmen atau analisa (*need assessment/analysis*) terhadap kebutuhan siswa menjadi hal pertama dan mendasari perencanaan program BK. Kemudian, perlu adanya dukungan dari unsur sekolah untuk menjamin program BK yang maksimal. Dasar perencanaan dijabarkan dan perlu ditetapkan kemudian dalam perencanaan layanan.

Asesmen atau analisa kebutuhan diperlukan, baik untuk perencanaan program jangka panjang, program jangka pendek, maupun program khusus, yang kemudian menjadi dasar dan mempengaruhi bagaimana program-program tersebut dirancang dan dikembangkan. Asesmen ini memengaruhi bagaimana landasan program, tujuan program, lingkup layanan yang diberikan, kegiatan yang direncanakan, teknis pelaksanaan dan sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.

Dalam pelaksanaan asesmen kebutuhan, POP BK (Kemdikbud, 2016) menyebutkan langkah-langkah asesmen tersebut, yaitu,

1. mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan, seperti tugas-tugas perkembangan, permasalahan dan prestasi peserta didik/konseli;
2. memilih instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data, termasuk instrumen dengan pendekatan masalah (AUM-U, AUM-PTSDL, DCM), instrumen dengan pendekatan SKKPD (IIP), atau instrumen dengan pendekatan tujuan empat bidang layanan (pribadi, sosial, belajar, karir) melalui angket, pedoman observasi, wawancara, atau sosiometri;
3. data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa, serta diinterpretasikan untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan yang kemudian akan dilayani.

Kondisi atau kebutuhan peserta didik sebagai konseli perlu dilihat secara utuh, meliputi aspek fisik-motorik, kognitif, sosial, emosi, moral, dan religious/spiritual. Dalam upaya memahami konseli, Sukmadinata (2007) menyebutkan dua kelompok teknik pemahaman atau pengumpulan data konseli yang umum dilakukan, yaitu Teknik tes dan non-tes. Tabel berikut merangkumkan jenis-jenis tes yang dapat digunakan atau perlu dimanfaatkan untuk pemahaman konseli.

Teknik Tes		Teknik Non-Tes	
a.	IQ/EQ/SQ Test	a.	Observasi
b.	Aptitude test	b.	Interviu
c.	Achievement test	c.	Angket atau kuesioner
d.	Personality test	d.	Sosiometri
e.	Projection test	e.	Home visit
f.	Personality inventory	f.	Case conference
		g.	Case study
		h.	Autobiography
		i.	Diary/catatan harian/jurnal siswa
		j.	Studi dokumenter
		k.	Analisa pekerjaan siswa
		l.	AUM, ITP, DCM

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data dan Pemahaman Konseli

Dalam proses asesmen kebutuhan, Sukmadinata (2007) memberikan kerangka ringkas, dimana identifikasi terhadap peserta didik dilakukan untuk memahami kebutuhan (fisik, sosial, afeksi, dan intelektual), tantangan yang mereka hadapi (dalam studi, karir, sosial, dan pembinaan diri), dan masalah yang ada dalam keseharian peserta didik (termasuk dalam hal pendidikan atau pengajaran, karir, dan sosial maupun pribadi). Dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, guru BK dapat melakukan pengamatan, membuat catatan anekdot, menyusun check list, ataupun daftar pernyataan untuk mengumpulkan data dari peserta didik. Terhadap identifikasi masalah, pengamatan, catatan anekdot, angket atau daftar cek (seperti AUM dan DCM) dan studi dokumen dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data. Kemudian, data yang teridentifikasi dan terkumpul, dianalisa, diinterpretasi dan disimpulkan.

Kerangka *need analysis* serupa dikembangkan oleh Brown dan Trusty (2005). Asesmen yang diusulkan dilakukan terhadap lima komponen atau unsur yang berbeda, antara lain

1. Kebutuhan guru, yang berisi area atau hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana guru menangani/menghadapi siswa dan perlu mendapatkan bantuan dari guru BK;
2. Topik atau diskusi BK yang lalu, yang pernah diselenggarakan sebelumnya dan direncanakan untuk program selanjutnya dan dinilai kebutuhannya oleh guru yang lain;
3. Kebutuhan siswa, versi siswa, yang berisi topik-topik atau permasalahan yang dibutuhkan atau sedang dialami oleh para siswa,
4. Kebutuhan siswa, versi guru, berisi kebutuhan-kebutuhan siswa menurut persepsi guru dan dinilai prioritas kebutuhan pemberian layanannya, dan
5. Kebutuhan konseling yang dianggap perlu dan mendesak (berdasarkan besarnya jumlah siswa) dari pandangan sekolah lain di sekitar.

Data-data yang terkumpulkan kemudian diolah untuk menentukan dan memberi masukan terhadap penentuan dan perancangan tujuan layanan, meliputi (1) kebutuhan apa saja yang perlu dilayani, (2) kapan layanan tersebut akan dilaksanakan, (3) bagaimana kebutuhan akan ditangani atau layanan tersebut akan diberikan, dan (4) bagaimana mengukur ketercapaian tujuan layanan sebagai upaya mengevaluasi keberhasilan atau dampak layanan (Brown dan Trusty, 2005).

Selain kebutuhan dari sisi siswa, POP BK (Kemendikbud, 2016) juga mengingatkan adanya kebutuhan yang perlu dinilai dan dianalisa oleh guru BK adalah kebutuhan sarana-prasarana yang menunjang layanan BK nantinya. Analisa kebutuhan sarana prasarana tersebut dapat menilik apa yang sudah ada atau tersedia, apa yang masih dibutuhkan atau perlu diadakan, dan tujuan pengadaan sarana prasarana tersebut.

Hal selanjutnya setelah asesmen kebutuhan dilakukan, untuk mengupayakan perencanaan program BK yang maksimal, guru BK perlu menilik dukungan unsur sekolah yang ada. Unsur sekolah yang dimaksudkan melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang ada. Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam mendukung program BK sekolah. Rekan-rekan guru juga berperan mendukung program BK yang ada, karena mereka yang juga menghadapi dan memahami kondisi siswa sehari-hari di kelas. Orang tua dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan bagi program BK juga. Upaya-upaya untuk mengumpulkan dukungan tersebut dapat diadakan melalui konsultasi, rapat, sosialisasi dan usaha persuasi lainnya.

Kemudian, dasar-dasar perencanaan program juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program BK. Dasar-dasar seperti landasan filosofis dan teoritis selalu menjadi pertimbangan. Prinsip-prinsip dan asas-asas layanan maupun pengelolaan program yang telah dijabarkan sebelumnya, juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan dan perencanaan program BK. Kembali lagi, bahwa perencanaan program BK didasari pada pemenuhan kebutuhan peserta didik sebagai konseli, yang kemudian mengingatkan pentingnya asesmen/analisa kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan perancangan program BK, tidak terbatas pada dasar filosofis dan teoritis semata.

Brown dan Trusty (2005) menambahkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan program BK, antara lain:

1. ketersediaan dukungan administratif, karena program BK nantinya juga melibatkan unsur-unsur administratif sekolah;
2. pemilihan dan penetapan pemimpin yang mengarahkan langkah dan mengawal proses perencanaan dan desain,
3. ketersediaan sumber daya yang mendukung, termasuk secara finansial, manusia/SDM, dan fisik/sarana prasarana;
4. pertimbangan kondisi dan masalah yang ada dalam program/layanan BK yang telah dilaksanakan sebelumnya;
5. penyusunan jadwal kerja yang jelas untuk optimalisasi pelaksanaan layanan BK,

6. pengukuran/pertimbangan dampak positif dan/atau negatif yang potensial muncul nantinya, dan
7. kebutuhan konsultan dari luar sekolah jika diperlukan untuk menyusun rancangan program yang lebih maksimal.

## B. Perancangan (Designing) Program BK

Setelah rencana disusun, desain atau rancangan yang lebih rinci dari program BK perlu diadakan. Dalam rancangan tersebut, POP BK dari Kemendikbud (2016) mencatat keperluan akan adanya rancangan rencana kerja yang diterjemahkan dalam program tahunan dan program semester.

Program tahunan secara rinci, berdasarkan acuan dari POP BK (Kemendikbud, 2016) menyertakan dua belas unsur, yaitu,

1. *Rasional*, berisi urgensi layanan BK, kondisi obyektif sekolah (meliputi permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, dan potensi keunggulan sekolah/siswa), kondisi obyektif lingkungan masyarakat (termasuk jika ada daya dukung maupun ancaman yang berpengaruh), dan harapan yang ingin dicapai dari program BK yang dirancang.
2. *Dasar hukum*, baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, maupun yang bersifat lokal seperti surat keputusan kepala sekolah atau pedoman dari penyelenggara sekolah (yayasan, dewan pendidikan, komite).
3. *Visi dan misi*, termasuk visi dan misi sekolah yang menjadi dasar dan mempengaruhi/diterjemahkan ke dalam visi-misi program BK.
4. *Deskripsi kebutuhan*, berdasarkan asumsi teoretik atau filosofi maupun hasil asesmen kebutuhan dan deskripsi ini dituangkan dalam rumusan perilaku sesuai dengan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) dan Kompetensi Dasar yang ada/dirancang.
5. *Tujuan program*, baik yang berfungsi *pengenalan* (memahami dan mengetahui perilaku atau standar kompetensi), *akomodasi* (upaya pemaknaan, internalisasi dan integrasi pengenalan yang telah diadakan), dan *tindakan* (bagaimana mewujudnyatakannya dalam keseharian siswa).
6. *Komponen program*, yang berisi *layanan dasar* (berupa bimbingan klasikal, kelompok atau lintas kelas, maupun melalui media yang mendukung), *layanan peminatan dan perencanaan individual* (termasuk di dalamnya kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler untuk menjawab minat tertentu dari peserta didik), *layanan responsif* (terhadap kebutuhan jangka pendek peserta didik dan lebih bersifat spesifik terhadap peserta didik, seperti konseling dan konsultasi individual), dan dukungan system (antara lain yang bersifat administrative maupun kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi konselor atau guru BK).
7. *Bidang layanan*, meliputi bidang karir, sosial, pribadi ataupun belajar.
8. *Rencana operasional*, yang dirincikan dalam tabel dan mendeskripsikan bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi, kelas yang dilayani, materi



dan metode yang digunakan, alat atau media yang mendukung, evaluasi yang dirancang dan ekuivalensi jam belajar dari layanan yang diberikan.

9. *Pengembangan tema atau topik*, didasarkan pada SKKPD, masalah yang akan dibahas, dan bidang layanan yang direncanakan. Ini yang menjadi dasar untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan (RPL) BK.
10. *Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut*.
11. *Sarana prasarana yang mendukung*.
12. *Anggaran pembiayaan*.

Kerangka yang lebih ringkas diusulkan oleh Gysbers dan Henderson (2014) untuk merancang program BK yang komprehensif. Dalam kerangka tersebut terdapat empat elemen yang menyusun program BK, yaitu:

1. *Konten*, menjabarkan kompetensi dan kebutuhan siswa.
2. *Kerangka organisasi*, berisi struktur layanan, aktivitas yang dirancang, dan waktu pelaksanaan layanan yang tepat.
3. *Sumber daya yang mendukung*, baik dalam hal personil/SDM, finansial, dan politis atau otoritas yang menaungi dan mendukung.
4. *Pengembangan, Pengelolaan dan Akuntabilitas Program*, antara lain merincikan proses perencanaan, perancangan, implementasi, evaluasi dan upaya penguatan program tersebut.

Gysbers dan Henderson (2014) juga mengingatkan beberapa pertimbangan yang perlu ditilik dalam perancangan program BK yang komprehensif, antara lain:

1. Kebutuhan siswa yang perlu dilayani dari program BK,
2. Manfaat atau dampak yang akan diterima oleh para siswa,
3. Kualifikasi petugas atau guru BK atau konselor yang akan melayani dan merancang program BK,
4. Hubungan atau keterkaitan program BK dengan program pendidikan secara utuh, menjadi bagian integral dari program pendidikan di sekolah;
5. Keefektifan dan efisiensi program BK yang dirancang,
6. Pengembangan dan pengelolaan program BK, dan
7. Pengukuran serta evaluasi program BK dan hasil atau dampak yang teramati dan terukur.

## Simpulan

Perencanaan dan perancangan merupakan dua unsur penting yang mengawali penyusunan program, termasuk penyusunan program layanan BK di lingkungan pendidikan. Mempersiapkan program BK yang optimal dapat dengan menyusun rencana dan rancangan yang jelas. Dengan rencana dan rancangan tersebut, guru BK memiliki panduan yang lebih rinci dan menolong untuk menyiapkan diri dalam memberikan layanan BK yang optimal.

**Daftar Pustaka**

- Santoadi, F. (2010). *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Bimbingan dan Konseling dalam praktek: Mengembangkan Potensi dan kepribadian Siswa*. Bandung: Maestro.
- Brown, D., & Trusty, J. (2005). *Designing and leading comprehensive school counseling programs: Promoting student competence and meeting student needs*. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2014). *Developing and managing your school guidance and counseling program*. John Wiley & Sons.
- Winkel, W. S., & Hastuti, M. S. (2005). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Media Abadi.
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling SD/SMP/SMA/SMK*.